



Kurikulum Merdeka untuk pemulihan krisis pembelajaran

Kurikulum Merdeka for learning crisis recovery

Tono Supriatna Nugraha

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Indonesia

tononugraha04@gmail.com

ABSTRACT

Transformation is natural and will always happen, meaning everything in life will continue to experience transformation, including education. The learning crisis, accompanied by the emergency condition of the COVID-19 pandemic, has dramatically impacted transformation in education in Indonesia. Kurikulum Merdeka, as one of the Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) efforts to overcome the learning crisis after the COVID-19 pandemic, has begun to be designed and implemented in ready schools. The article examines government policies regarding implementing the Kurikulum Merdeka, which is given to education units as an additional option to restore learning during 2022-2024. Implementing the Kurikulum Merdeka focuses on using technology and the learning community to share best practices between teachers, students, and academics. Various strategies and platforms have been developed to implement the Merdeka Curriculum, so it is hoped that all stakeholders involved can use all about the Kurikulum Merdeka optimally to restore learning after the COVID-19 pandemic.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 25 May 2022

Revised: 13 Aug 2022

Accepted: 19 Aug 2022

Available online: 24 Aug 2022

Publish: 26 Aug 2022

Keyword:

Kurikulum Merdeka; learning crisis; learning loss; restore learning

Open access

Inovasi Kurikulum is a peer-reviewed open-access journal.

ABSTRAK

Perubahan merupakan sesuatu yang alamiah dan selalu akan terjadi, artinya segala sesuatu dalam kehidupan ini sudah pasti akan terus mengalami perubahan, termasuk dalam dunia pendidikan. Krisis pembelajaran yang telah terjadi diiringi dengan kondisi kedaruratan pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap perubahan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka sebagai salah satu upaya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) untuk mengatasi krisis pembelajaran pasca pandemi COVID-19 mulai dirancang untuk diimplementasikan pada sekolah-sekolah yang sudah siap. Artikel mencoba mengkaji kebijakan pemerintah mengenai pengimplementasian Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Implementasi Kurikulum Merdeka ini berfokus pada pemanfaatan teknologi dan komunitas belajar untuk saling berbagi praktik baik antara guru, siswa, dan akademisi. Berbagai strategi dan platform telah banyak dikembangkan untuk implementasi Kurikulum Merdeka, sehingga diharapkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengimplementasian ini dapat memanfaatkannya dengan optimal sebagai upaya untuk pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Keteringgalan pembelajaran; krisis pembelajaran; Kurikulum Merdeka; pemulihan pembelajaran

How to cite (APA 7)

Nugraha, T. S. (2022). Kurikulum Merdeka untuk pemulihan krisis pembelajaran. *Inovasi Kurikulum*, 19(2), 251-262.

Peer review

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.

Copyright



2022, Tono Supriatna Nugraha. This an open-access is article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author, and source are credited. *Corresponding author: tononugraha04@gmail.com

INTRODUCTION

Perubahan digambarkan sebagai sesuatu yang alamiah dan selalu akan terjadi, artinya segala sesuatu dalam kehidupan ini sudah pasti akan terus mengalami perubahan, termasuk dalam dunia pendidikan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari munculnya berbagai macam inovasi baik dari segi sistem pendidikan, pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran, maupun hal-hal yang berkaitan dengan ranah pendidikan. Salah satu yang dapat terlihat adalah perubahan kurikulum di Indonesia yang dilakukan sebagai bentuk antisipasi perkembangan dan kebutuhan abad ke-21 yang merupakan bentuk penyempurnaan kurikulum berbasis karakter sekaligus kompetensi (Darise, 2019). Segala perubahan tersebut, terjadi akibat adanya perubahan kebutuhan kompetensi, sehingga mempengaruhi keberlangsungan pendidikan ke depannya.

Kemunculan pandemi COVID-19 pada akhir Desember 2019, menjadi salah satu titik di mana keberlangsungan pendidikan khususnya di Indonesia mengalami perubahan. Krisis pembelajaran yang telah terjadi diiringi dengan kondisi kedaruratan pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap perubahan pendidikan di Indonesia. Pada kasus ini, pendidikan harus ikut berubah dan berkembang mengikuti kebijakan akibat keberadaan pandemi COVID-19 agar pendidikan dapat tetap mencapai tujuan pembelajaran sesungguhnya (Nafrin & Hudaidah, 2021). Salah satunya dalam proses pembelajaran yang beralih menjadi pembelajaran jarak jauh karena terbatasnya waktu untuk berkumpul dan belajar dikelas di mana sistem ini pada akhirnya disepakati oleh sekolah dan universitas karena keadaannya yang mendesak (Churiyah *et al.*, 2020). Hal ini secara tidak langsung berdampak terhadap intensitas belajar baik karena pada dasarnya tidak ada yang siap 100% untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh khususnya pada negara-negara berkembang yang memerlukan upaya lebih dari berbagai aspek untuk dapat melaksanakannya dengan baik serta terhambat oleh infrastruktur yang buruk seperti jaringan listrik, jaringan Internet, aksesibilitas yang sulit, serta kemampuan digital yang cukup rendah (Hamdan *et al.* 2021; Onyema *et al.* 2020). Hal tersebut juga senada dengan penelitian yang disampaikan oleh Adi *et al.* (2021) berkaitan dengan dampak pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19, yang menyebutkan bahwa keterbatasan interaksi langsung serta ketersediaan aksesibilitas yang terbatas menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi.

Pandemi COVID-19, menyebabkan perubahan pada kurikulum sekolah sebagai panduan dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal ini sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Setiap terjadi perubahan pada kurikulum, guru harus mampu beradaptasi, mulai dari prinsip pembelajaran sampai pada proses asesmen, serta kerja sama yang baik antara siswa, guru, dan juga orang tua agar implementasi kurikulum dapat berjalan dengan optimal (Megandarisari, 2021). Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan bahwa pada hakikatnya kurikulum itu ada pada guru, jika guru tidak bisa mendalami kurikulum yang berlaku, maka tujuan pendidikan yang diinginkan tidak akan tercapai sehingga kemampuan guru dalam beradaptasi menjadi suatu hal yang penting meskipun memerlukan waktu (Yanti & Fernandes, 2021).

Dampak pandemi salah satunya adalah ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) dan kesenjangan pembelajaran (*learning gap*). Engzell *et al.* (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa siswa mengalami *learning loss* ketika belajar dari rumah. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain kondisi geografis, demografis, strategi, kebijakan, dan keadaan sekolah itu sendiri sebelum adanya pandemi (Donnelly & Patrinos, 2022). Selain itu keberadaan pandemi juga menyebabkan *learning gap* di mana keadaan siswa, kondisi keluarga, dan juga kondisi ekonomi menjadi faktor lain penyebab *learning gap* di masa pandemi COVID-19 (Bonal & González, 2020). Untuk mengantisipasinya, Kementerian Pendidikan pada tahun 2020 menerbitkan kurikulum darurat dalam kondisi khusus di satuan pendidikan.

Kurikulum Darurat (dalam kondisi khusus) ini pada intinya merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum darurat dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya, sehingga kurikulum darurat digambarkan memiliki fleksibilitas yang tinggi dengan memberikan ruang kepada satuan pendidikan untuk mendesain struktur kurikulum, kegiatan pembelajaran, dan media pembelajaran (Munajim *et al.*, 2020).

Pandemi COVID-19 telah mengubah cara belajar siswa, di mana rata-rata pembelajaran dilakukan secara daring di rumah dengan berbagai kebijakan yang menyertainya agar tidak menyulitkan guru, siswa, maupun orang tua (Dewi & Wajdi, 2021). Hal ini sangat sulit untuk efektif bila mana kala siswa tidak dapat belajar sendiri tanpa bantuan dari guru. Peserta didik dan orang tua juga akan merasakan kesulitan bila mana tidak mampu menguasai teknologi untuk melakukan proses pembelajaran (Onyema *et al.*, 2020). Menyikapi kondisi tersebut, maka guru harus memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Guru dituntut untuk lebih kreatif memanfaatkan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan (Yanti & Fernandes, 2021). Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang berada pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah dalam kondisi khusus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi Peserta Didik (Darise, 2019).

Selanjutnya dijelaskan bahwa Satuan Pendidikan pada Kondisi Khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat tetap mengacu pada Kurikulum Nasional disederhanakan (ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan). Kurikulum nasional untuk pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Pilihan lain untuk pelaksanaan sekolah juga dapat melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.

Pada dasarnya, kurikulum Darurat atau kondisi khusus merupakan rancangan kurikulum dengan menyederhanakan Kurikulum Nasional yang diperkirakan dapat memenuhi layanan pendidikan dalam situasi pandemi COVID-19. Penyederhanaan tersebut terletak pada pengurangan kompetensi dasar bagi setiap mata pelajaran. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Munajim *et al.* (2020) pada penelitiannya untuk mendukung keefektifan kurikulum tersebut, pemerintah telah menyiapkan modul dan asesmen untuk menjadi acuan pembelajaran pada jenjang tertentu. Hal ini dilakukan untuk mencapai keefektifan pembelajaran tanpa guru harus merasa terburu-buru untuk mengejar target Kurikulum Nasional, sehingga siswa diharapkan paham dan menjadikannya wawasan sekaligus syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam rangka pemulihan pembelajaran, satuan pendidikan diberikan opsi dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. Tiga opsi kurikulum tersebut yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemdikbudristek), dan Kurikulum Merdeka.

Guru sebagai aktor utama dalam dunia pendidikan harus selalu siap dengan segala perubahan kebijakan yang terjadi di dalam ranah pendidikan. Saat ini yang dibutuhkan adalah peran nyata para pihak yang terlibat untuk terus melakukan sosialisasi mengenai Kurikulum Nasional, agar para guru benar-benar siap dalam mengimplementasikannya. Sosialisasi kurikulum ini harus sampai pada guru-guru pelaksana dan tidak dibeda-bedakan. Artinya, bahwa kurikulum baru bisa berjalan jika sudah dilakukan sosialisasi secara efektif dan efisien. Selain itu ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan diseminasi, antara lain kesiapan para guru, kondisi geografis dan penyebaran informasi. Pada pelaksanaannya kurikulum pada setiap satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik dalam

berbagai situasi termasuk pada masa pandemi COVID-19 (Yanti & Fernandes, 2021). Situasi COVID-19 ini termasuk ke dalam salah satu kondisi khusus yang menyebabkan *learning loss* pada siswa akibat kebijakan pembelajaran dari rumah yang terpaksa diterapkan akibat pandemi (Engzell *et al.*, 2021).

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut di atas, dapat tergambarkan berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi perbedaan ketercapaian kompetensi siswa sebagai akibat krisis pembelajaran yang terjadi ini, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu di mana Kurikulum Merdeka menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada Kurikulum Merdeka, mengedepankan konsep “Merdeka Belajar” bagi siswa yang dirancang untuk membantu pemulihan krisis pembelajaran yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19. Penggunaan teknologi dan kebutuhan kompetensi di era sekarang ini, menjadi salah satu dasar dikembangkannya Kurikulum Merdeka (Marisa, 2021). Pemanfaatan teknologi yang semakin masif serta program lain yang direncanakan oleh pemerintah seperti Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK), dan sebagainya menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka untuk pemulihan krisis pembelajaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pengimplementasian Kurikulum Merdeka yang telah dirancang oleh pemerintah di satuan pendidikan untuk pemulihan krisis pembelajaran akibat adanya pandemi COVID-19. Dengan terlaksananya penelitian ini dapat gambaran bentuk-bentuk ideal dari pengimplementasian Kurikulum Merdeka, sehingga diharapkan Kurikulum Merdeka ke depannya dapat secara optimal menjadi upaya untuk menyelesaikan krisis pembelajaran yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 serta ketertinggalan pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.

LITERATURE REVIEW

Kurikulum dijelaskan sebagai salah satu istilah dalam dunia di sekolah. Pada tingkat satuan pendidikan dikenal istilah KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang mulai diperkenalkan pada tahun 2006 seiring dengan pemberlakuan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang menjadi acuan dalam pengembangan KTSP (Precalya, 2021). Pengertian kurikulum juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19 yaitu: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu,” sehingga dapat dilihat bahwa kurikulum adalah sebagai sebuah rencana dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dalam pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia telah melaksanakan beberapa kurikulum sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kurikulum-kurikulum tersebut telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 serta yang terbaru adalah kurikulum 2013 (Ritonga, 2018). Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara (Septian & Dewi, 2021). Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai suatu konsep yang harus mampu menjawab semua tantangan yang ada di mana kurikulum diterapkan (Islam, 2017).

Kurikulum harus responsif dan komprehensif dalam kehidupan sosial tidak *overload*, relevan, dan mampu menyeimbangkan keberagaman dan keperluan dalam setiap masa (Julaeha, 2019). Selain itu, kurikulum harus selalu dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan dalam faktor yang mendasarinya (Insani, 2019). Seiring perkembangannya, kurikulum selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan siswa. Salah satunya Kurikulum 2013 yang menjadi rujukan Pendidikan Nasional saat ini yang sepenuhnya

mendorong pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa dituntut untuk aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran dan guru dengan segala keilmuannya tidak hanya berperan sebagai pengajar tapi dituntut untuk menjadi inspirator (Rindiantika, 2017). Pembelajaran lebih mengoptimalkan daya pikir dan kreativitas siswa untuk menambah keterampilan dan pengetahuannya, belajar menemukan melalui eksperimen (Ikhsan & Hadi, 2018). Perbedaan yang mendasar dengan kurikulum sebelumnya adalah, guru tidak lagi menerapkan metode berceramah dan bukan hanya satu-satunya sumber pengetahuan, bisa saja siswa mendapatkan pengetahuan dari sumber lainnya, seperti dari internet. Peran guru mendorong siswanya untuk mengalami sendiri proses yang membuat meningkatnya pengalaman mereka.

Pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu tidak lepas dari makna kurikulum itu sendiri. Kurikulum yang dimaknai dalam arti sempit sebagai suatu rencana tentang pengalaman belajar siswa di suatu lembaga pendidikan sangat berguna dalam mengembangkan kurikulum (Oktapiani, 2019). Pengembangan kurikulum penting untuk dilakukan sebagai landasan operasional proses pembelajaran dengan melihat bagaimana kondisi siswa di tiap-tiap satuan pendidikan terutama kondisi pasca dilanda pandemi COVID-19. Kondisi inilah yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, salah satunya adalah Kurikulum Merdeka sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi krisis pembelajaran pasca pandemi. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji mengenai kebijakan Kurikulum Merdeka sebagai bentuk pengembangan kurikulum dan respon atas adanya krisis pembelajaran akibat adanya COVID-19.

METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni *historical research* atau *documentary study* yang dijelaskan oleh Connaway & Radford dalam bukunya yang berjudul "*Research methods in Library and Information Science*" memaparkan bahwa teknik mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan perkembangan topik penelitian melalui berita, dokumen resmi pemerintah, dan sebagainya, kemudian dilanjutkan dengan mengompilasi bibliografi rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka serta perkembangannya untuk mengatasi krisis pembelajaran pasca pandemi. Setelah dokumen terkumpul, kemudian dianalisis dengan diperkuat oleh rujukan-rujukan lain yang relevan dengan topik penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)

Kurikulum Merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menerbitkan kebijakan mengenai pengembangan Kurikulum Merdeka. Opsi kebijakan pengembangan Kurikulum Merdeka ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai tambahan upaya untuk melakukan pemulihan krisis pembelajaran selama 2022-2024 akibat adanya pandemi COVID-19. Kebijakan Kemdikbudristek mengenai Kurikulum Nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran, merujuk pada kondisi di mana pandemi COVID-19 yang menyebabkan kendala dan dampak yang cukup signifikan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Hal tersebut, senada dengan penelitian yang disampaikan Amalia & Sa'adah (2020), bahwa COVID-19 ini memberikan dampak terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan beberapa tantangan yang perlu dihadapi berkaitan dengan keterbatasan kemampuan adaptasi dan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa, sarana dan prasarana yang kurang memadai, akses internet terbatas, serta kurangnya keinginan untuk menganggarkan.

Kurikulum 2013 menjadi satu-satunya kurikulum yang digunakan pada masa sebelum pandemi di satuan pendidikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pada masa di awal pandemi tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Kemdikbudristek mengeluarkan kebijakan untuk pengimplementasian Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan). Kemudian pengimplementasian tersebut, juga menjadi rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan. Setelah itu, pada masa pandemi tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Kemdikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP) dan SMK Pusat Keunggulan (PK).

Di masa sebelum dan pandemi COVID-19, Kemdikbudristek menerbitkan kebijakan untuk penggunaan Kurikulum 2013 serta penyederhanaan Kurikulum 2013 menjadi kurikulum darurat yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pelaksanaan proses pembelajaran dengan substansi materi yang esensial. Keberadaan Kurikulum Merdeka di SP/SMK-PK menjadi salah satu *best practice* sebagai upaya perbaikan dan pemulihan krisis pembelajaran akibat keberadaan pandemi COVID-19 yang diluncurkan pertama kali tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, Kemdikbudristek juga memberikan kebijakan untuk sekolah yang belum siap untuk menggunakan Kurikulum Merdeka. Sekolah-sekolah tersebut masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran untuk pemulihan krisis pembelajaran tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Begitu juga Kurikulum Darurat yang merupakan modifikasi dari Kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan pendidikan tersebut.

Selama proses pengimplementasian Kurikulum Merdeka sebagai salah satu opsi bagi satuan pendidikan ini dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dilakukan proses pendataan untuk melihat satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum Merdeka. Setelahnya, tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan Kurikulum Nasional yang akan dilakukan oleh Kemdikbudristek berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi acuan bagi Kemdikbudristek dalam pengambilan kebijakan lanjutan pasca pemulihan krisis pembelajaran.

Pemulihan pembelajaran pasca pandemi menjadi hal yang disoroti oleh Kemdikbudristek karena dianggap sebagai hal yang penting. Pada proses pemulihan ini, internet, *big data*, *artificial intelligence*, 5G, dan komputasi awan akan banyak berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pasca pandemik (Zhu & Liu, 2020). Hal tersebut juga senada dengan rencana dari Kemdikbudristek yang melibatkan banyak teknologi, informasi, dan komunikasi dalam proses pemulihan pembelajaran pasca pandemi ini.

Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka tidak dilaksanakan secara serentak dan masif. Kemdikbudristek memberikan kebijakan mengenai keleluasaan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan tingkat kesiapannya. Beberapa program yang mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) adalah dengan program Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK). Pada program tersebut Kemdikbudristek memberikan dukungan dalam IKM mendapatkan pengalaman yang baik dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. *Best practice* dan konten pembelajaran dalam IKM pada SP/SMK-PK teridentifikasi dengan baik dan digambarkan dapat menjadi contoh bagi satuan pendidikan lainnya. Penyediaan dukungan IKM yang diberikan oleh Kemdikbudristek adalah upaya dari Kemdikbudristek untuk memberikan dukungan pembelajaran IKM secara mandiri dan dukungan pendataan IKM jalur mandiri. Dukungan-dukungan yang diberikan oleh Kemdikbudristek tadi kemudian akan memperlihatkan calon satuan pendidikan yang terdata berminat untuk pelaksanaan IKM. Calon satuan pendidikan tersebut kemudian akan memperoleh pendampingan pembelajaran untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri, sehingga guru, kepala sekolah, pengawas serta *stakeholder* dapat mengadakan kegiatan berbagi *best practice* dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka baik dalam bentuk seminar maupun lokakarya secara mandiri.

Hasil pendataan yang sebelumnya dilakukan oleh Kemdikbudristek akan diperoleh data kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri, sehingga dapat terpetakan satuan pendidikan mana yang akan memperoleh dukungan berupa pendampingan di bawah Kemdikbudristek dalam menjalankan IKM jalur mandiri. Berbagai *best practice* dan konten pembelajaran dari Kurikulum Merdeka jalur mandiri teridentifikasi dengan jelas sehingga menjadi fokus pada pendampingan oleh Kemdikbudristek nantinya. Pendampingan ini mengarahkan pengimplementasian IKM menjadikan pembelajaran yang lebih aktif dan adaptif dengan memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk menjalankan proses pembelajaran yang berorientasi pada proyek pembelajaran (Faiz *et al.*, 2022).

SP/SMK-PK yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dapat saling berbagi pengalaman *best practice* dan pembelajaran, sehingga diharapkan akan terbentuk jejaring dukungan antar guru dan tenaga kependidikan untuk berbagi konten pembelajaran dan *best practice* Kurikulum Merdeka. Komunitas yang berkembang diharapkan dapat mendukung ekosistem yang siap menerapkan Kurikulum Merdeka secara nasional pada tahun 2024 yang secara masif dan terarah. Jejaring dukungan antar guru ini sangat membantu sebagai ekosistem yang baik untuk mendukung pengimplementasian suatu program dalam proses pembelajaran seperti yang disampaikan dalam penelitian yang dilakukan Apriliyanti *et al.* (2022), menjadi salah satu sarana bagi guru untuk berbagi metode, strategi dan pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran khususnya di masa pandemi

Strategi IKM Jalur Mandiri

Kurikulum Merdeka yang menjadi kebijakan dari Kemdikbudristek pelaksanaannya direncanakan dimulai pada 2021 yang diterapkan pada Sekolah Penggerak. Pada tahun 2022, Kemdikbudristek akan mencoba untuk melakukan pendataan yang nantinya akan menjadi dasar pada penerapan Kurikulum Merdeka ini ke depannya di satuan pendidikan. Terdapat beberapa strategi IKM jalur mandiri yang dipetakan oleh Kemdikbudristek di mana strategi ini juga akan dijadikan tindak lanjut dari kebijakan tersebut.

Strategi pertama, yakni Rute Adopsi Kurikulum Merdeka Secara Bertahap. Dalam pendekatan strategi ini berfokus pada upaya bagaimana memfasilitasi satuan pendidikan untuk mengenali kesiapannya sebagai dasar dalam menentukan pilihan IKM serta untuk memberikan umpan balik berkala setiap 3 bulan. Hal tersebut dilakukan untuk memetakan kebutuhan penyesuaian dukungan IKM baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Strategi kedua, yakni Menyediakan Asesmen dan Perangkat Ajar (*High Tech*). Pada strategi kedua ini, pendekatan strategi difokuskan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dalam menyediakan beragam pilihan asesmen dan perangkat ajar (buku teks, modul ajar, contoh proyek, contoh kurikulum) dalam bentuk digital. Asesmen dan perangkat ajar tersebut dapat digunakan satuan pendidikan dalam melakukan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Merdeka.

Strategi ketiga, yakni dengan Menyediakan Pelatihan Mandiri dan Sumber Belajar Guru (*High Tech*), di mana pada pendekatan strategi ini juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini berfungsi dalam melakukan pelatihan mandiri Kurikulum Merdeka yang dapat diakses secara daring oleh guru dan tenaga kependidikan untuk memudahkan adopsi Kurikulum Merdeka disertai sumber belajar dalam bentuk video, *podcast*, atau *ebook* yang juga dapat didistribusikan melalui media penyimpanan. Pada strategi kedua dan ketiga ini, lebih difokuskan pada penggunaan teknologi untuk implementasi Kurikulum Merdeka. Di masa pandemi COVID-19, teknologi memegang peranan yang begitu penting dalam pelaksanaan pendidikan. Keberadaan teknologi ini menjadi jembatan baik dalam segi teknis pelaksanaan maupun sumber belajar agar terjadi pembelajaran jarak jauh yang terjadi karena adanya batasan dalam pelaksanaan pendidikan akibat pandemi (Churiyah *et al.*, 2020).

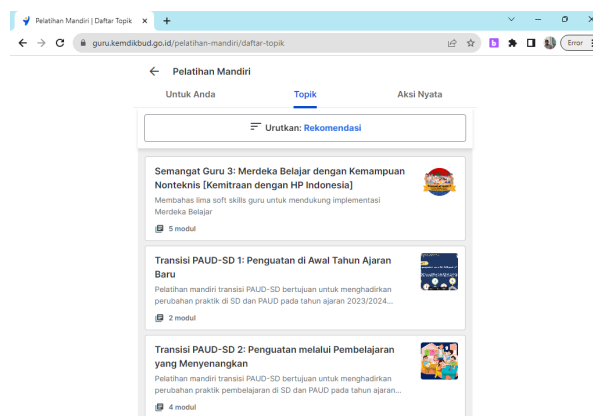
Strategi keempat, yakni Menyediakan Narasumber Kurikulum Merdeka (*High Touch*). Pada strategi keempat ini, pendekatan strategi yang digunakan adalah dengan menyediakan narasumber kurikulum merdeka dari Sekolah Penggerak/SMK PK yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat dilakukan dalam bentuk webinar atau pertemuan luring yang diadakan Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan baik dalam bentuk seminar tatap muka, lokakarya, maupun pertemuan lainnya. Strategi kelima, yakni Memfasilitasi Pengembangan Komunitas Belajar (*High Touch*). Strategi kelima ini berfokus pada pemanfaatan komunitas belajar dibentuk oleh lulusan Guru Penggerak maupun diinisiasi pengawas sekolah sebagai wadah saling berbagi *best practice* dalam mengadopsi Kurikulum Merdeka di internal satuan pendidikan maupun lintas satuan pendidikan. Komunitas belajar dapat menciptakan ruang berbagi dan terbuka dalam proses pembelajaran.

Pada strategi keempat dan kelima, strategi difokuskan pada pertemuan-pertemuan baik dengan pertemuan yang menghadirkan narasumber maupun dengan komunitas belajar. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Mutiani *et al.* (2020), bahwa untuk menciptakan ruang terbuka antara guru, siswa, dan akademisi ketika melaksanakan aktivitas pembelajaran termasuk saling berbagi dalam implementasi Kurikulum Merdeka dapat dilakukan dengan melibatkan komunitas.

Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka jalur mandiri yang diawali dengan pendataan yang dilakukan oleh Kemdikbudristek dimaksudkan untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Harapan dari pendataan ini adalah Kemdikbudristek dapat melihat sejauh mana kesiapan satuan pendidikan yang nantinya akan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ke depannya dan tidak memaksakan implementasi secara masif. Strategi-strategi di atas, memperlihatkan bagaimana Kemdikbudristek sangat mengandalkan teknologi dan komunitas belajar dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka. Dari hal tersebut juga terlihat bahwa Kemdikbudristek memilih untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ini secara bertahap dan tidak terburu-buru. Selain itu, kondisi lain yang mempengaruhi terutama kondisi pasca pandemi COVID-19 menjadi situasi yang perlu diwaspadai serta menjadi perhatian untuk saat ini dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sebagai upaya untuk pemulihan krisis pembelajaran.

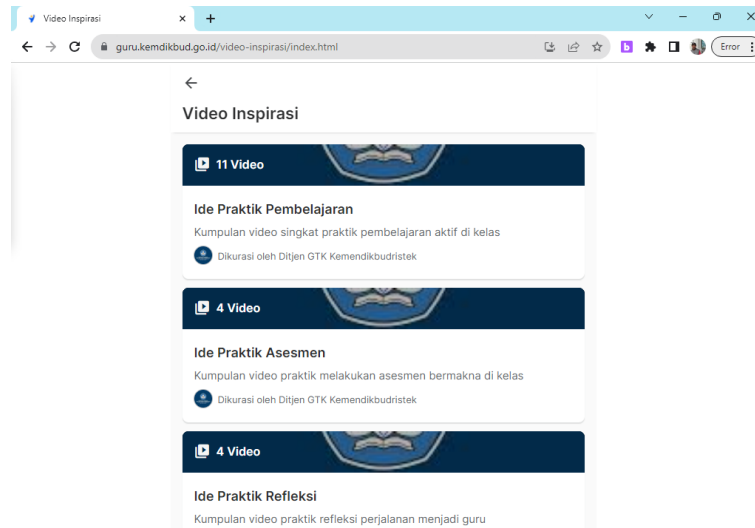
Peran Platform Merdeka Mengajar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Kemdikbudristek mengembangkan Platform Merdeka Mengajar (PMM). PMM ini merupakan platform edukasi yang menjadi media penggerak untuk para guru dalam mewujudkan Pelajar Pancasila. Platform ini memiliki fitur Belajar, Mengajar, dan Berkarya untuk mendukung pelaksanaan IKM ini. PMM menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajarnya yang sesuai dan sejalan dengan Kurikulum Merdeka, seperti yang dapat dilihat pada **Gambar 1** berikut.



Gambar 1. Tampilan Fitur “Belajar” untuk fasilitas pelatihan mandiri mengenai Kurikulum Merdeka
Sumber: Penelitian 2022

Gambar 1 di atas memperlihatkan fitur “Belajar” pada PMM memberikan fasilitas pelatihan mandiri yang dapat diakses oleh guru sebagai sebuah kesempatan untuk guru dan tenaga kependidikan dalam memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Menurut penelitian [Susilawati et al. \(2021\)](#) ini juga menjelaskan bahwa PMM menjadi salah satu wadah yang dapat digunakan untuk guru dalam mendukung proses pengimplementasian Kurikulum Merdeka khususnya di masa pasca pandemi COVID-19. Fitur lain dari PMM ini adalah video inspirasi. Tampilan pada video inspirasi dapat dilihat melalui **Gambar 2** berikut.

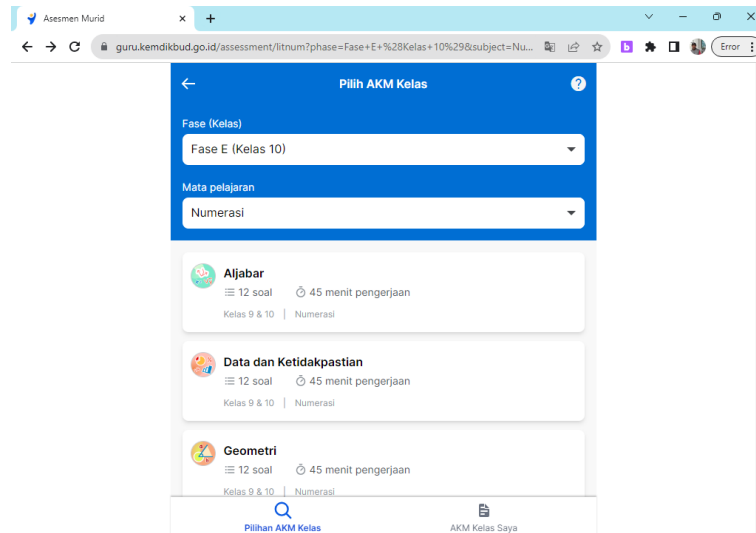


Gambar 2. Tampilan Fitur “Belajar” untuk melihat video inspirasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka
Sumber: Penelitian 2022

Fitur yang ditampilkan pada **Gambar 2** di atas memberikan akses kepada guru dan tenaga kependidikan untuk memperoleh beragam video inspiratif yang diharapkan dapat membantu untuk mengembangkan kualitas dari kompetensi guru serta tenaga kependidikan dalam IKM. PMM mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi *best practice*.

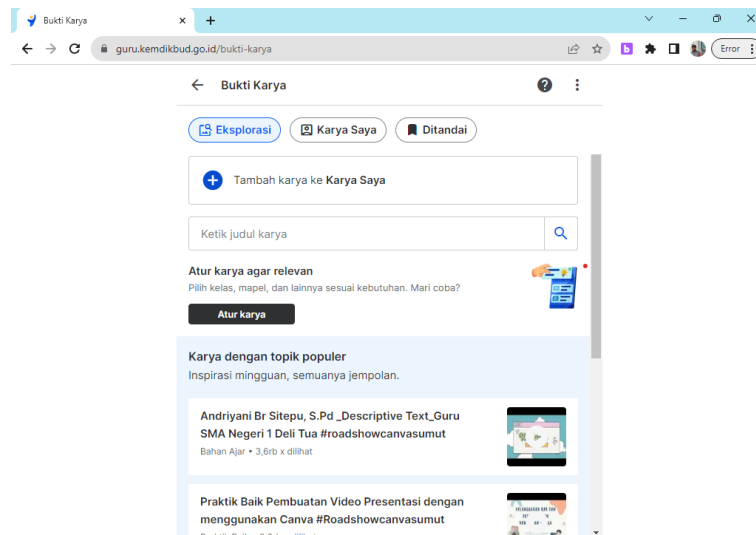
Dalam fitur “Mengajar”, terdapat fitur perangkat ajar yang dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan untuk keperluan mengembangkan diri dan kompetensinya. Saat ini, tersedia lebih dari 2000 referensi perangkat ajar berbasis Kurikulum Merdeka yang dapat dimanfaatkan.

PMM dapat menjadi salah satu solusi untuk menciptakan sinergi kolaborasi antara sekolah, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan ([Susilawati et al., 2021](#)). Selanjutnya adalah fitur asesmen murid yang dikembangkan untuk membantu guru dan tenaga kependidikan melakukan analisis diagnostik terkait kemampuan siswa dalam literasi dan numerasi dengan cepat. Hasil analisis tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan siswa. PMM ini memberikan kesempatan yang sama dan setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan di manapun sesuai dengan konsep *lifelong learning*. Tampilannya dapat dilihat melalui **Gambar 3** berikut.



Gambar 3. Tampilan Fitur “Mengajar” untuk melihat perangkat asesmen pada Kurikulum Merdeka
 Sumber: Penelitian 2022

Fitur lainnya dari PMM adalah “Berkarya”, di mana fitur ini adalah memberikan “Bukti Karya Saya” yang merupakan *best practice* dari hasil implementasi pembelajaran terutama terkait pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. Melalui fitur ini, guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menyusun portofolio hasil karyanya agar terus dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi sehingga guru dapat maju dan berkembang bersama. Hal tersebut kembali menegaskan bahwa pengimplementasian Kurikulum Merdeka ini, mengedepankan kolaborasi komunitas belajar, di mana komunitas belajar ini penting untuk menciptakan ruang terbuka dalam proses pelaksanaan pembelajaran (Mutiani *et al.*, 2020). Tampilannya dapat dilihat pada **Gambar 4** berikut.



Gambar 4. Tampilan Fitur “Berkarya” untuk melihat dan membagikan karya guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka
 Sumber: Penelitian 2022

PMM yang dikembangkan diharapkan mampu menjadi media dan teman bagi guru dalam pelaksanaan IKM dengan menggunakan semangat kolaborasi dan saling berbagi. Konten-konten yang dikembangkan oleh Kemdikbudristek dapat memberikan pemahaman yang lebih saat implementasi dan pembelajaran di satuan pendidikan yang telah ikut serta dalam IKM. Dari pelaksanaan IKM yang memanfaatkan PMM ini dapat terlihat bagaimana teknologi dimanfaatkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran khususnya pada masa pasca pandemi COVID-19 (Churiyah *et al.*, 2020).

CONCLUSION

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka menjadi salah satu fokus Kemdikbudristek saat ini. Implementasi Kurikulum Merdeka salah satunya bertujuan untuk pemulihan krisis pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Krisis pembelajaran yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 ini, mengakibatkan satuan pendidikan perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum Darurat yang sudah dilaksanakan selama pandemi sebagai masukan untuk implementasi Kurikulum Merdeka nantinya. Perubahan merupakan sesuatu yang alamiah dan selalu akan terjadi, termasuk dalam dunia Pendidikan. Krisis pembelajaran yang telah terjadi diiringi dengan kondisi kedaruratan pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap perubahan pendidikan di Indonesia. Berbagai strategi telah dikembangkan oleh Kemendikbud untuk kemudian implementasinya dapat disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikannya masing-masing.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut terlihat dengan dikembangkannya *platform* untuk membantu dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka. Selain itu, pelibatan komunitas belajar sebagai tempat berbagi praktik baik dengan melibatkan guru, siswa dan akademisi. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dapat terlihat gambaran ideal mengenai implementasi Kurikulum Merdeka sehingga seluruh *stakeholder* yang terlibat dapat secara optimal dalam upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID-19.

AUTHOR'S NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

REFERENCES

- Adi, N. N. S., Oka, D. N., & Wati, N. M. S. (2021). Dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 43-48.
- Amalia, A., & Sa'adah, N. (2020). Dampak wabah COVID-19 terhadap kegiatan belajar mengajar di Indonesia. *Jurnal Psikologi*, 13(2), 214-225.
- Apriliyanti, D. L., Suryani, L., & Rohmat, F. N. (2022). Pelatihan pembuatan butir soal menggunakan Google Form pada MGMP bahasa Inggris pada tingkat SMP di Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. *Abdimas Siliwangi*, 5(1), 62-72.
- Bahri, S. (2017). Pengembangan kurikulum dasar dan tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15-34.
- Bonal, X., & González, S. (2020). The impact of lockdown on the learning gap: Family and school divisions in times of crisis. *International Review of Education*, 66(5-6), 635-655.
- Churiyah, M., Sholikhah, S., Filianti, F., & Sakdiyyah, D. A. (2020). Indonesia education readiness conducting distance learning in COVID-19 pandemic situation. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(6), 491.
- Darise, G. N. (2019). Implementasi kurikulum 2013 revisi sebagai solusi alternatif pendidikan di Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 13(2), 41-53.
- Dewi, M. P., & Wajdi, M. B. N. (2021). Distance learning policy during pandemic COVID-19. *Eduotec: Journal of Education and Technology*, 4(3), 325-333.
- Donnelly, R., & Patrinos, H.A. (2022). Learning loss during COVID-19: An early systematic review. *Prospects*, 51, 601-609.
- Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. D. (2021). Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(17), 1-7.

- Faiz, A., Parhan, M., & Ananda, R. (2022). Paradigma baru dalam kurikulum prototipe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1544-1550.
- Hamdan, K. M., Al-Bashaireh, A. M., Zahran, Z., Al-Daghestani, A., AL-Habashneh, S., & Shaheen, A. M. (2021). University students' interaction, Internet self-efficacy, self-regulation and satisfaction with online education during pandemic crises of COVID-19 (SARS-CoV-2). *International Journal of Educational Management*, 35(3), 713-725.
- Ikhsan, K. N., & Hadi, S. (2018). Implementasi dan pengembangan kurikulum 2013. *Jurnal Edukasi: Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi*, 6(1), 193-202.
- Insani, F. D. (2019). Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 43-64.
- Islam, S. (2017). Karakteristik pendidikan karakter: Menjawab tantangan multidimensional melalui implementasi kurikulum 2013. *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 89-100.
- Marisa, M. (2021). Inovasi kurikulum "Merdeka Belajar" di era society 5.0. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 5(1), 66-78.
- Megandarisari, M. (2021). Adaptasi kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini di masa pandemi COVID-19. *Inovasi Kurikulum*, 18(1), 1-9.
- Munajim, A., Barnawi, B., & Fikriyah, F. (2020). Pengembangan kurikulum pembelajaran di masa darurat. *Dwijia Cendekia: Jurnal Riset Pedagogik*, 4(2), 285-291.
- Mutiani, M., Abbas, E. W., Syaharuddin, S., & Susanto, H. (2020). Membangun komunitas belajar melalui lesson study model Transcript Based Learning Analysis (TBLA) dalam pembelajaran Sejarah. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 3(2), 113-122.
- Nafrin, I. A., & Hudaidah, H. (2021). Perkembangan pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 456-462.
- Oktapiani, M. (2019). Perencanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan di Indonesia. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 71-102.
- Onyema, E. M., Eucheria, N. C., Obafemi, F. A., Sen, S., Atonye, F. G., Sharma, A., & Alsayed, A. O. (2020). Impact of coronavirus pandemic on education. *Journal of Education and Practice*, 11(13), 108-121.
- Precalya, H. M. (2021). Link & match pendidikan sebagai ideologi neoliberalisme (analisis wacana tentang dominasi elit dalam pendidikan kejuruan di Indonesia). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(4), 1416-1425.
- Rindiantika, Y. (2017). Model pembelajaran paikem: Suatu upaya dalam meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(1), 103-116.
- Ritonga, M. (2018). Politics and policy dynamics of changing the education curriculum in Indonesia until the reformation period. *Bina Gogik*, 5(2), 1-15.
- Rosidah, C. T., Pramulia, P., & Susiloningsih, W. (2021). Analisis kesiapan guru mengimplementasikan asesmen autentik dalam kurikulum merdeka belajar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(01), 87-103.
- Septian, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Revitalisasi nilai luhur Pancasila sebagai resonansi kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology, and Counseling*, 3(1), 10-20.
- Susilawati, E., Sarifudin, S., & Muslim, S. (2021). Internalisasi nilai Pancasila dalam pembelajaran melalui penerapan profil pelajar Pancasila berbantuan platform Merdeka Mengajar. *Jurnal Teknodik*, 25(2), 155-167.
- Yanti, A., & Fernandes, R. (2021). Adaptasi guru terhadap pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 (studi kasus Guru MAN 2 Kota Padang Panjang). *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 4(3), 459-471.
- Zhu, X., & Liu, J. (2020). Education in and after COVID-19: Immediate responses and long-term visions. *Postdigital Science and Education*, 2(3), 695-699.